

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Aset Pengelolaan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Penelitian ini dilakukan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai Mei 2018.

3.2 Jenis Data

1. Jenis Data Menurut Sumber

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan dan Aset Pengelolaan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, berupa APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- b. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Aset Pengelolaan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang membantu penulis dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini berupa Laporan Keuangan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.

2. Jenis Data Menurut Sifat

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan dan Aset Pengelolaan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam laporan keuangan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen seperti laporan realisasi APBD Kabupaten Sumba Barat Daya.
2. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Pengelolaan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya atau yang mewakili, guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Definisi Operasional

Tabel 3.1

Definisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Indikator	Tolak Ukur
1.	Anggarran Pendapatan dan Belanja Daerah	Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh peerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah	1. Pendapatan 2. Belanja 3. Pembiayaan	Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.	Pendapatan	Aliran kas masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (untuk kombinasi) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha	Analisis Varian Pendapatan	1. Pendapatan > Jumlah anggaran = baik (Favourable Varians) 2. Pendapatan < Jumlah Anggaran = baik (Unfavourable Varians)
			Analisis Pertumbuhan Pendapatan	1. Pendapatan tahun t lebih besar dari pendapatan tahun t-1 = Pertumbuhan Positif 2. Pendapatan tahun t lebih kecil dari pendapatan tahun t-1 = Pertumbuhan Negatif
			Rasio Derajat Desentralisasi	Prosentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah:

				0% s.d 10% = Sangat Kurang 10% s.d 20% = Kurang 20,01% s.d 30% = Sedang 30,01% s.d 40% = Cukup 40,01% s.d 50% = Baik > 50% = Sangat Baik
			Rasio Ketergantungan Kauangan Daerah	0% s.d 10% = Sangat Kurang 10% s.d 20% = Kurang 20,01% s.d 30% = Sedang 30,01% s.d 40% = Cukup 40,01% s.d 50% = Baik > 50% = Sangat Baik
			Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0% s.d 10% = Sangat Kurang 10% s.d 20% = Kurang 20,01% s.d 30% = Sedang 30,01% s.d 40% = Cukup 40,01% s.d 50% = Baik > 50% = Sangat Baik
			Rasio Efektifitas PAD	Sangat Efektif : > 100% Efektif : > 100% Cukup Efektif : 90% - 99% Kurang Efektif : 75% - 89% Tidak Efektif : < 75%
			Rasio Efisiensi PAD	Sangat Efisien : > 10% Efisien : 10% -

				20%% Cukup Efisien : 21% - 30% Kurang Efisien : 31% - 40%% Tidak Efisien : > 40%
3.	Belanja Daerah	Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	Analisis Varian Belanja	1. Pendapatan > Jumlah Anggaran = baik (Favourable Varians) 2. Pendapatan < Jumlah Anggaran = tidak baik (Unfavourable Varians)

3.5 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni dengan menggunakan dua metode analisis yakni analisis kinerja pendapatan dan analisis kinerja belanja. Untuk menganalisis sejauh mana tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam menganggap kasus tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Analisis Kinerja Pendapatan

1. Analisis Varians (selisih) Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui

apakah Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau dalam beberapa periode anggaran, kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Rumus untuk mengetahui analisis pertumbuhan pendapatan adalah:

$$\frac{\text{Pertumbuhan Pendapatan Th } t}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t-1)}{\text{Pendapatan Th } (t-1)} \times 100\%$$

3. Analisis Rasio Keuangan

a. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Derajat Desentralisasi}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Nilai untuk rasio ini dikategorikan sebagai berikut:

Sangat baik : >50%

Baik : 40,01% - 50,00%

Cukup : 30,01% - 40,00%

Sedang : 20,01% - 30,00%

Kurang : 10,01% - 20,00%

Sangat kurang : 00,00% - 10,00%

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

<i>Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah</i>	$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
---	--

Skala pengukuran ketergantungan keuangan daerah dikategorikan sebagai berikut:

Sangat rendah	: 0,00% - 10,00%
Rendah	: 10,01% - 20,00%
Sedang	: 20,01% - 30,00%
Cukup	: 30,01% - 40,00%
Tinggi	: 40,01% - 50,00%
Sangat Tinggi	: >50,00%

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

<i>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</i>	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$
--	--

Skala Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan sebagai berikut :

Sangat kurang	: 0,00% - 10,00%
Kurang	: 10,01% - 20,00%
Sedang	: 20,01% - 30,00%
Cukup	: 30,01% - 40,00%
Baik	: 40,01% - 50,00%
Sangat baik	: >50,00%

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan target PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$
--

Skala pengukuran efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat efektif	: >100%
Efektif	: 90% - 100%
Cukup efektif	: 80% - 90%
Kurang efektif	: 60% - 80%
Tidak efektif	: <60%

b. Analisis Kinerja Belanja

1. Analisis Varians (selisih Belanja)

Dalam hal belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan.

$$\text{Analisis Varians} = \frac{\text{Anggaran} - \text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Dan digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, jika yang terjadi adalah sebaliknya maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$